

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dengan berbagai suku bangsa mempunyai keanekaragaman kearifan lokal, kearifan tradisional, dan budaya yang didalamnya terkandung nilai-nilai etik dan moral, serta norma-norma yang sangat mengedepankan pelestarian fungsi lingkungan. Nilai-nilai tersebut menyatu dalam kehidupan masyarakat setempat, menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan alam, memberi landasan yang kuat bagi pengelolaan lingkungan hidup, menjadikan hubungan antara manusia dengan alam menjadi lebih selaras dan harmoni sebagaimana di tunjukkan dalam pandangan manusia pada fase pertama evolusi hubungan manusia dengan alam, yaitu *pan cosmism* (Hadi, 2009: 23). Pada saat itu kondisi alam dengan berbagai unsur sumberdayanya dapat terpelihara dan terjaga keseimbangannya, sehingga alam benar-benar berfungsi mendukung kehidupan manusia atau masyarakat di sekitarnya.

Tradisi *subak* di Bali yang menyalurkan air untuk pertanian, *sasi* di Maluku dan Papua yang mencegah penangkapan ikan secara berlebihan (Salim, dalam Rohadi, 2007:35), *zoning* di Papua dan *karuhun* di tanah Sunda yang mengatur pengelolaan lahan/hutan, dan air (Hadi, 2009: 28-30), serta *leuweung* di tanah Sunda untuk pengelolaan dan tata guna hutan dan lahan (Abdilah, 2007:2) adalah sebagian contoh kearifan lokal yang sangat ramah lingkungan dan berdampak positif bagi kehidupan warga masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut sebenarnya menunjukkan realitas sosial yang tidak saja membuktikan bentuk-bentuk tanggung jawab etik dan moral, wujud dari keserasian dan keselarasan hubungan antara manusia dengan alam, akan tetapi juga menunjukkan bahwa secara naluriah manusia memiliki kecenderungan untuk selalu memahami lingkungannya, menjalin ikatan yang sedemikian dekat dengan alam; juga merupakan cermin dari masyarakat yang mandiri.

Kearifan lokal yang sebenarnya merupakan modal sosial tersebut, dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan kiranya penting

untuk digali, dikaji dan ditempatkan pada posisi strategis untuk dikembangkan, menuju pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan kearah yang lebih baik.

Nenek moyang kita sebenarnya telah mewariskan berbagai macam kearifan tradisional yang berfungsi mencegah kerusakan lingkungan, baik sumberdaya lahan, hutan, maupun air. Selain tradisi *subak*, *sasi*, *zoning*, *karuhun*, *leuweung*, masih banyak tradisi lain yang arif lingkungan, seperti *nyabuk gunung*, *bersih desa* dan *susuk wangan* di Jawa Tengah, *Tri Hita Karana* dan *tenget* di Bali, *wetu alam* di Lombok Tengah; semuanya merupakan kearifan lokal yang merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan mampu mempertebal kepaduan sosial warga masyarakat, serta secara empiris mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Sayangnya tradisi-tradisi tersebut saat ini sudah mulai pudar sebagai akibat penetrasi budaya modernisme yang sulit dihindarkan.

Pakem *wetu alam* yang mengatur tata guna lahan dan pola tanam pada masyarakat di Lombok Tengah (Zuhdi, 2007:66-67) sudah pudar, Sistem *sasi* di Maluku tidak lagi ampuh, mulai terdesak oleh nelayan luar daerah (Hadi, 2009:93), konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan prinsip hidup orang Bali, dalam prakteknya sudah tidak sesuai konsep, tercermin dari semakin rusaknya hutan dan kebersihan lingkungan yang semakin menurun (Kompas, 12 September 2010). Nilai-nilai kearifan masyarakat *Dayak Manyaan* di Barito Timur, Kalimantan dalam memandang alam dan lingkungan yang menekankan keseimbangan dan kedamaian, dan tradisi *Senguyun* (gotong royong) dalam menggarap lahan dan menanam; telah tertekan oleh gerakan sistemis roda pemerintahan dan pembangunan yang merupakan produk kapitalis (Hartatik, 2005:45, 46, 55).

Tradisi-tradisi yang ada di Jawa Tengah seperti *nyabuk gunung* yang menyarankan daerah pertanian berbukit harus ditanami tanaman untuk mencegah erosi dan membuat sengkedan mengikuti garis contour (Hadi, 2009:51, 92), *bersih desa* yang bertujuan mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan aman dari bencana, *susuk wangan* untuk membersihkan saluran-saluran air untuk mengairi sawah secara bersama-sama; juga sudah mulai luntur. Seiring dengan pandangan antroposentris yang mulai mewarnai sikap dan perilaku manusia, maka hubungan yang harmoni antara manusia dengan alam mulai berubah. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai satu-satunya

sumber kebenaran, sedangkan pemikiran dan nilai-nilai tradisional yang tidak memiliki otoritas ilmiah tidak dianggap sebagai sumber kebenaran (Hadi, 2007:45). Dengan modal ilmu pengetahuan dan teknologi, pada kenyataannya justru dipakai untuk mengeksploitasi sumberdaya alam dengan tanpa batas, sehingga mengakibatkan terjadinya bencana alam di sana-sini.

Pengelolaan lingkungan hidup yang pada hakekatnya adalah bagaimana melakukan upaya agar kualitas kehidupan manusia dan kualitas lingkungan semakin baik, harus dilakukan dengan memperhatikan potensi sumberdaya sosial seperti kearifan lingkungan tradisional, dengan tujuan pokok untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Salah satu komponen lingkungan yang sangat esensial bagi kehidupan manusia adalah "air". Air sangat dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Kekurangan air manusia, hewan, dan tumbuhan akan terganggu pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitasnya, bahkan akan mati (Manik, 2009: 130-131). Air dimanfaatkan untuk berbagai sektor ekonomi, baik rumah tangga, pertanian, industri, infrastruktur, transportasi maupun rekreasi dan jasa (Suparmoko, 2008:158). Begitu pentingnya air bagi kehidupan, maka oleh Pindar (dalam Kodoatie & Sjarief, 2010:1) dikatakan bahwa "*Water is the best of allthings.*" Namun seiring dengan semakin tingginya tingkat kerusakan hutan, ketersediaan air saat ini secara umum dirasakan semakin berkurang, sedangkan kebutuhan air semakin meningkat. Di sisi lain penanganan masalah kerusakan sumberdaya hutan dan air melalui jalur-jalur formal, sering tidak mampu menyelesaikan masalah sampai pada akar permasalahannya, sehingga kondisi lingkungan tidak semakin baik, tetapi sebaliknya justru semakin memburuk. Hutan terus saja mengalami kerusakan yang tercermin dengan terus menyusutnya vegetasi penutup tanah (Arsyad & Rustiadi, 2008:95), alih fungsi lahan hutan terus terjadi, perambahan hutan terus berlangsung, pohon-pohon pelindung sumber- sumber air ditebangi, sehingga peresapan air kedalam tanah terganggu, debit air pada mata air terganggu, bahkan tidak sedikit mata air yang mati. Kekurangan air dirasakan terutama pada musim kemarau, yang sering memicu terjadinya konflik antar pengguna air, baik antar wilayah hulu dengan hilir, antar sektor, dan antar kelompok petani (Arsyad & Rustiadi, 2008:95-96).

Salah satu penyebab kegagalan penanganan masalah tersebut adalah diabaikannya kearifan-kearifan lokal. Selama ini kearifan lokal yang sering diartikan sebagai kebijakan

setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*) (Purba, 2005:81), di beberapa tempat dan pada beberapa kasus (pengusahaan hutan misalnya) sering dianggap menghambat pembangunan. Bahkan dengan gencarnya pembangunan yang menggunakan teknologi tinggi dan cenderung eksploitatif, dan kuatnya pengaruh budaya modernisme, seringkali mengakibatkan semakin pudarnya penghayatan nilai-nilai budaya tradisional disatu sisi; namun disisi lain diduga masih terdapat kearifan-kearifan lokal yang mampu mempertahankan eksistensinya, mampu memelihara, menjaga, dan melestarikan sumberdaya alam (baik lahan, hutan, maupun air) untuk mendukung kehidupan secara berkelanjutan.

Kabupaten Kendal terutama wilayah Kecamatan Boja merupakan daerah pertanian produktif yang sangat membutuhkan air. Namun saat ini daerah tersebut secara umum mengalami kekurangan air, kecuali di Dusun Ngijo, Desa Purwogondo. Hal tersebut tercermin dari semakin meluasnya konflik pemanfaatan air, dan semakin banyaknya warga yang memperdalam sumur gali miliknya, karena permukaan air sumur menurun. Belum lagi jika dikaitkan dengan kebijakan ketahanan pangan; dengan UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; dimanapun mengatur ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan, cadangan, penganekaragaman, pencegahan, dan penanggulangan masalah pangan, peran pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat, dan pengembangan sumberdaya manusia. Bahkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Pasal 11 ayat (3) mengatakan bahwa Ketahanan Pangan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kemudian muncul Perpres RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Pasal 2 mengatakan DKP bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; dan pada Pasal 7 dan 10 mengarahkan pembentukan DKP Propinsi dan Kabupaten/Kota. Diperkuat lagi PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di mana disarankan pembentukan Badan Ketahanan Pangan atau Unit Struktural yang berbentuk kantor atau badan. Untuk mewujudkan ketersediaan, cadangan, dan penganekaragaman pangan, maka dalam proses produksi, ketersediaan air menjadi bagian integral yang tidak dapat terpisahkan

dan ketersediaannya harus memadai.

Ketersediaan air ini juga sangat dibutuhkan di daerah Kabupaten Kendal, terutama di wilayah Kecamatan Boja, Desa Purwogondo dan sekitarnya untuk berbagai kepentingan. Namun masalahnya adalah ketersediaan air yang semakin berkurang. Dari 10 (sepuluh) mata air yang ada di Desa Purwogondo, 9 (sembilan) diantaranya debit airnya cukup fluktuatif ; dan hanya 1 (satu) mata air yang debit airnya besar dan ajeg, yaitu Tuk Serco. Hal tersebut terkait dengan keberadaan kearifan lokal yang memelihara, menjaga dan melestarikan mata air.

Atas dasar fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di desa Purwogondo, untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis seperti apa dan bagaimana kearifan lokal yang ada telah diterapkan. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menghasilkan temuan-temuan dan rekomendasi yang bermanfaat dalam pengelolaan lingkungan guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Dengan fenomena-fenomena tersebut, maka sebagai pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

Bagaimana persepsi masyarakat Desa Purwogondo terhadap mata air, bagaimana kearifan lokal masyarakat Desa Purwogondo dalam menjaga dan melestarikan mata air Tuk Serco, dan bagaimana masyarakat Desa Purwogondo menjaga kearifan lokal terkait dengan Tuk Serco di masa yang akan datang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap mata air.
2. Mengetahui, mengkaji, dan menganalisis secara mendalam kearifan lokal masyarakat Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, yang selama ini dijadikan pedoman dalam memelihara, menjaga dan melestarikan mata air.

3. Mengetahui dan mengkaji sejauh mana kearifan lokal dapat dipertahankan guna menjaga dan melestarikan mata air.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti: adalah pemahaman secara lebih mendalam dan komprehensif tentang kearifan lokal penduduk Desa Purwogondo dan penerapannya untuk memelihara dan melestarikan mata air.
2. Bagi Lingkungan akademis: Dapat menambah khasanah pengetahuan lokal yang dapat dijadikan sebagai pijakan empiris untuk penelitian lanjutan bagi kemungkinan memadukan kearifan lokal dengan kearifan rasional.
3. Bagi Masyarakat: Memberikan semangat dan menyadarkan kembali tentang arti pentingnya nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
4. Bagi Pemerintah dan Pihak Swasta: Sebagai bahan masukan untuk dasar penentuan kebijakan bahwa kearifan lokal yang secara efektif mampu memelihara, menjaga, dan melestarikan sumberdaya alam (air), perlu mendapatkan perhatian dan dijadikan sebagai mitra kerja.

1.5. Keaslian Penelitian

Dari hasil studi pustaka, terdapat penelitian terdahulu yang mengkaji kearifan lokal terkait upaya pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam, yang sedikit ada kesamaan dengan penelitian yang penulis ajukan, namun juga banyak perbedaan-perbedaan, baik pada segi waktu, tempat, maupun obyek kajiannya.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Kajian/Tahun	Nama Penulis	Tujuan
1	Tengget Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan (Studi kasus Revita-lisasi Kearifan Lingkungan Lokal Mengenai Lingkungan Di Desa Adat (2002)	I Dewa Gede Raka	Membangun pemahaman tentang Tengget dalam hubungannya dengan pembangunan dalam konteks pembangunan berkelanjutan

2	Upaya Revitalisasi Peran Subak Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan (Studi Kasus Subak Jatiluwih dan Subak Kloda Tabanan (2002)	I Made Oka Sunaryasa	Untuk mengetahui nilai-nilai subak yang telah melemah.
3	Penerapan konsep Tri Hita Karana Dalam Hubungannya dengan Pelestarian Fungsi Lingkungan Permu-kiman Pada Perumnas Monang Maning di Kota Denpasar (2002).	Ketut Laba	Untuk mengetahui hubungan & pengaruh konsep Tri Hita Karana terhadap pelestarian fungsi lingkungan permukiman

Sumber: Perpustakaan Program Magister Ilmu Lingkungan Undip, 2010.